

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan tentang rangkuman dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

Tabel 2. 1
Review Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis(Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Efektifitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo(Mattonasi <i>et al.</i> , 2023)	Pengendalian, Kredit Macet	Teknik yang berhasil digunakan dalam meminimalisir kredit macet adalah : 1. Teknik preventif, yaitu menyeleksi debitur dengan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur. 2. Teknik represif merupakan tindakan penagihan atau penyelesaian setelah kredit tersebut dinyatakan macet.	Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yaitu, membahas penanganan kredit macet. Sedangkan perbedaannya yaitu dari objek penelitian
2	PERANAN	Pegendalia	PT Primaper Tradea	Perbedaan

	<p>PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PIUTANG PADA PT PRIMAPER TRADEA UTAMA (Rachimadita, 2013)</p>	<p>n intern, piutang usaha, manajemen piutang</p>	<p>Utama dalam hal pelaksanaan pengendalian intern atas piutang usaha sudah cukup baik, perusahaan ingin dalam pelaksanaan pengendalian intern tersebut dapat lebih meningkatkan efektivitas penerimaan piutang usaha.</p>	<p>nya adalah terletak pada objek, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas perhal pengendalian piutang usaha.</p>
3	<p>EVALUASI PROSEDUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PIUTANG USAHA PADA PT SPS (DEPO GEDANGAN) (Istanti, 2020)</p>	<p>Pengendalian intern, sistem dan prosedur</p>	<p>Penentuan jumlah pemberian kredit disatu pihak akan memperbesar volume penjualan, namun sebaliknya apabila tidak ditentukan batas kredit maka akan menyebabkan kebutuhan-kebutuhan lainnya akan terancam dan bahkan dapat menimbulkan kemacetan usaha. Penjualan kredit menimbulkan dua masalah yang saling bertentangan, disatu pihak volume penjualan akan meningkat dilain pihak akan beresiko kerugian karena adanya tagihan</p>	<p>Perbedaan terletak pada judul dan arah penelitian. pada penelitian ini terfokus pada pengendalian intern terhadap piutang usaha. sedangkan pada penelitian terdahulu terfokuskan pada evaluasi pengendalian intern dalam perusahaan.</p>

			tanpa PPN dan piutang yang tidak dapat tertagih.	
4	PENGENDALIAN INTERN PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH KP-RI JAYA DINAS P DAN K KABUPATEN SIMALUNGU N (<i>Naibaho et al.</i> , 2019)	Pengendalian Intern, Piutang Tak Tertagih	Pengendalian intern dalam meminimalkan piutang tak tertagih melakukan beberapa langkah, diantaranya penjemputan langsung, melakukan negosiasi, memberhentikan penyaluran pinjaman, memperhatikan masa kerja dan melakukan penyitaan surat berharga.	Perbedaan pada penelitian i yaitu terletak pada tujuannya, yaitu pada penelitian terdahulu meminimalkan piutang tak tertagih, sedangkan pada peneltian ini
5	2021 Tinjauan Sistematis Longitudinal terhadap Penilaian Risiko Kredit dan Prediktor Gagal Bayar Kredit (Jurnal Internasional)	risiko kredit, prediksi gagal bayar kredit, pinjaman digital, manajemen risiko digital	Alur penelitian yang berfokus pada proses pada saat pengajuan kredit terutama mempertimbangkan faktor keuangan dan kelembagaan seperti syarat dan ketentuan pinjaman, karakteristik pinjaman lainnya, dan rasio keuangan. Berbagai kelompok penelitian yang berkonsentrasi pada periode pembayaran kembali penggunaan kredit menekankan pada literasi keuangan,	Dalam penelitian terdahulu terseut hanya memaparkan segi risiko kredit dan gagal bayar kredit, sedangkan dalam peneitian saat ini peneliti membahas strategi mengatasi kredit bermasalah. Sedangkan

			sikap terhadap uang dan kredit, dinamika sosial, perilaku belanja, pola konsumsi, usia, pendapatan dan kekayaan, status sosial ekonomi, keterampilan pengelolaan uang, kesehatan mental, kesejahteraan. dan pengetahuan keuangan sebagai korelasi terhadap perilaku pembayaran kembali	persamaan nya adalah membahas risiko kredit.
--	--	--	--	--

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konservatisme

Konservatisme menurut Watts merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metoda akuntansi yang melaporkan laba atau aset yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi (Andreas *et al.*, 2017). Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk menetralkan optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Penerapan konsep konservatisme akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan

mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas pada masa depan

2.2.2 Pengertian Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan pengukuran kinerja, profitabilitas dan pengamanan aset perusahaan, mencerminkan kualitas sistem informasi akuntansi agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, menyiratkan pentingnya ketaatan terhadap berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berlaku, serta berbagai kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh perusahaan. (Ardana dan Lukman, 2016:76).

Sistem pengendalian intern sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan bisnis atau usaha. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat dengan tujuan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memberikan keyakinan yang cukup mendukung dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang mempunyai kaitan satu sama lain.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal, serta meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Salah satu tujuan utamanya adalah melindungi

aset perusahaan dari kerugian, pencurian, atau penyalahgunaan melalui penerapan prosedur pengawasan yang ketat dan pemisahan tugas yang tepat. Selain itu, pengendalian internal bertujuan untuk memastikan keandalan dan keakuratan laporan keuangan, sehingga manajemen dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar dan tepat waktu. Pengendalian internal juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku, sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasinya. Dengan pengendalian yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif, baik itu risiko operasional, keuangan, maupun strategis. Ini juga membantu dalam pencapaian tujuan strategis dengan mengarahkan sumber daya ke area yang paling penting dan produktif. Pengendalian internal mendorong akuntabilitas dan transparansi di seluruh tingkat organisasi, sehingga setiap individu memahami tanggung jawabnya dan bekerja menuju tujuan bersama. Ini menciptakan budaya organisasi yang mendukung etika kerja yang tinggi dan integritas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Melalui evaluasi dan pemantauan terus-menerus, pengendalian internal memastikan bahwa proses dan prosedur organisasi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan pengendalian intern menurut Alvin Arens (Rachimadita, 2013). Menyatakan tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang cukup efektif yaitu sebagai berikut :

1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan merupakan bentuk dari pemenuhan tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang di sorot dalam point ini yaitu memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan perusahaan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Memperkuat ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan organisasi dalam jalur terhadap tujuan yang ingin dicapai. (Rachimadita, 2013).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, menghasilkan efisiensi dan efektivita dalam operasional dan dapat diterapkannya peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku secara konsisten guna menjaga harta kekayaan perusahaan untuk menciptakan ketelitian dan keandalan data akuntansi, untuk mendorong efisiensi guna mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien dan efektif. Sehingga dapat dipatuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan, memastikan keandalan dan keakuratan pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku. Pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dengan memastikan bahwa proses bisnis berjalan secara optimal dan sumber daya digunakan dengan bijaksana. Sistem ini juga membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan

organisasi. Selain itu, pengendalian internal mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab di seluruh tingkat organisasi melalui pembagian tugas yang jelas dan pemantauan kinerja yang ketat. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pengendalian internal membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan strategis, operasional, dan keuangan perusahaan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan, menjaga aset perusahaan, dan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pengendalian internal juga membantu dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi.

2.2.4 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern menurut COSO (*The Commite Of Sponsoring Organization*) seperti yang dikutip oleh Soekrisno Agoes (Rachimadita, 2013) komponen pengendalian intern dikelompokkan kedalam:

- a) Aktivitas Pengendalian;

- b) Lingkungan Pengendalian;
- c) Penilaian Resiko;
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Memonitor

Adapun unsur-unsur pengendalian intern tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijak dan prosedur, selain dari empat komponen lain yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. Banyak sekali kebijakan dan prosedur dalam suatu satuan usaha. Tetapi dapat dipecahkan menjadi beberapa kategori yaitu pemisahan tugas, pengendalian fisik, pengendalian pengolahan informasi dan review kinerja.

2) Lingkungan Pengendalian

Terdiri dari tindakan kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang menggambarkan sikap manajemen dan para pegawai mengenai pengendalian dan kepentingannya. Ini adalah fondasi dari semua komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi dari karyawan perusahaan; filosofi dan gaya operasi manajemen; struktur organisasi; serta cara perusahaan mendelegasikan

wewenang dan tanggung jawab. Lingkungan yang baik menciptakan kesadaran pengendalian di seluruh organisasi.

3) Penilaian Risiko

Semua organisasi tanpa memperhatikan ukuran, struktur atau jaringan industri menghadapi suatu risiko intern dan ekstem. Manajemen organisasi harus dapat memperhitungkan resiko. Organisasi harus secara rutin mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Ini melibatkan analisis risiko internal dan eksternal serta penentuan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola atau diminimalkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga personil yang tepat akan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Suatu sistem informasi akuntansi akan mencapai tujuan pelapora keuangan. Informasi harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh personil. Pengendalian internal yang efektif memerlukan adanya informasi yang relevan dan berkualitas baik yang dikumpulkan dan disampaikan tepat waktu. Komunikasi yang baik harus ada di semua tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu memahami peran mereka dalam sistem

pengendalian internal dan memiliki informasi yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab mereka.

5) Memonitor (Pengawasan dan Pemantauan)

Memonitor merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan kepada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Atau dengan kata lain. Tujuan memonitor adalah menilai kualitas kinerja pengendalian intern mengawasi seluruh aktivitas, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Proses pengendalian internal harus dipantau secara terus-menerus atau secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan monitoring rutin, audit internal, serta penilaian kinerja. Pemantauan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Intern

Menurut Azhar Susanto mengemukakan bahwa keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan (*Error*)

Muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah. Proses

pengendalian internal harus dipantau secara terus-menerus atau secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Ini bisa terjadi akibat ketidakmengertian, kelelahan, atau tekanan kerja yang berlebihan, yang dapat menyebabkan pelaksanaan prosedur yang salah atau tidak konsisten.

b. Kolusi (Colusion)

Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (Korupsi) ditempat mereka bekerja. Pengendalian internal dapat dilanggar melalui kolusi antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk menipu sistem. Kolusi ini bisa melibatkan karyawan, manajemen, atau pihak eksternal, yang dapat membuat deteksi kecurangan menjadi sulit.

c. Penyimpangan Manajemen

Terjadi karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat bawah, tidak efektif pada tingkat atas. Manajemen memiliki wewenang untuk mengesampingkan pengendalian internal tertentu. Ini bisa dilakukan untuk mempercepat proses atau untuk tujuan tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan risiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan transparan.

d. Manfaat dan biaya Biaya

Pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut. Desain dan implementasi pengendalian internal harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Tidak mungkin untuk menghilangkan semua risiko tanpa mengeluarkan biaya yang tidak sepadan.

Keterbatasan pengendalian internal adalah aspek-aspek yang dapat mengurangi efektivitasnya meskipun sudah dirancang dan diterapkan dengan baik. Salah satu keterbatasan utama adalah kesalahan manusia, di mana karyawan bisa membuat kesalahan karena ketidaktahuan, kelelahan, atau kurangnya pelatihan. Selain itu, kolusi antara dua atau lebih individu bisa mengatasi pengendalian internal, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan meskipun ada pemisahan tugas yang baik. Manajemen juga memiliki wewenang untuk mengesampingkan pengendalian internal dalam situasi tertentu, yang bisa meningkatkan risiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Biaya implementasi

pengendalian internal juga harus seimbang dengan manfaatnya. Terlalu banyak pengendalian bisa menjadi mahal dan tidak efisien, sementara terlalu sedikit pengendalian bisa meningkatkan risiko.

Perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau regulasi dapat membuat pengendalian internal yang ada menjadi usang atau tidak efektif jika tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada kompetensi dan integritas karyawan. Tanpa pelatihan yang memadai dan budaya kerja yang mendukung, pengendalian internal bisa gagal. Dengan memahami keterbatasan ini, organisasi dapat lebih siap menghadapinya dan merancang sistem pengendalian internal yang lebih fleksibel dan adaptif. Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus juga penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal

2.2.6 Piutang

1. Pengertian Piutang

Pengertian Piutang Menurut Skousen menjelaskan bahwa secara umum, istilah piutang dapat diterapkan ke semua klaim atas uang, barang dan jasa, akan

tetapi untuk tujuan akuntansi istilah tersebut secara umum digambarkan dalam lingkup yang lebih sempit untuk menggambarkan klaim yang diharapkan akan selesai dengan diterimanya uang tunai (kas). Sedangkan menurut Soemarso SR menjelaskan bahwa Piutang adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan normal perusahaan, perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lainnya. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa yang berutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah uang dari pihak lain akibat penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dalam akuntansi, piutang merupakan aset perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas di masa mendatang. Piutang biasanya timbul ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan atau kliennya, memungkinkan mereka untuk membayar di kemudian hari sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hak terhadap pihak lain, dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan

aktiva atau jasa lainnya kepada pihak lain dengan siapa ia memiliki piutang. Oleh karena adanya manfaat (dalam bentuk diterimanya uang tunai, aktiva lain atau jasa) yang diharapkan dapat diperoleh dimasa datang, maka piutang dianggap sebagai aktiva.

2. **Klasifikasi Piutang**

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi. Menurut Keiso, Weygandt, Warfield. Piutang dapat dibagi sebagai berikut(Rachimadita, 2013) :

- a) Piutang Lancar (piutang jangka pendek)
- b) Piutang tak lancar (jangka panjang)

Menurut Skousen memberikan klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang Dagang

- a) Wesel Tagih atau notes receivables Wesel tagih ini didukung oleh suatu janji formal tertulis untuk membayar.
- b) Piutang Usaha atau accounts receivables Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin "rekening terbuka". Piutang dagang merupakan suatu pelunasan kredit jangka pendek kepada

pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam 30 hari hingga 90 hari.

2. Piutang non-dagang

Piutang non dagang meliputi semua jenis piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi-tranaksi, yaitu sebagai berikut:

- a) Penjualan surat berharga atau properti lainnya selain persediaan
- b) Deposit atau simpanan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran atas beban
- c) Kalim untuk pemotongan atau pengembalian pajak
- d. piutang deviden dan bunga

3. Kebijakan Manajemen Piutang

Kebijakan manajemen piutang adalah serangkaian pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengelola piutang secara efektif. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan arus kas, meminimalkan risiko piutang tak tertagih, dan memastikan bahwa piutang dikumpulkan dalam jangka waktu yang wajar. Piutang yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya diharapkan dapat tertagih tepat pada waktunya, akan tetapi ada kalanya piutang tidak ditagih kembali. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perusahaan perlu mengelola piutang. Kebijakan kredit yang dikemukakan

oleh Brigham dan Houston (Rachimadita, 2013) terdiri sebagai berikut ini:

1. Masa kredit yang merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya.
2. Potongan yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat, termasuk persentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran angsuran harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemberian potongan.
3. Standar kredit yang memiliki arti kekuatan keuangan yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit.
4. Kebijakan penagihan, yang diukur oleh seberapa keras atau lunak perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat pembayarannya.

Menurut James mengemukakan bahwa kebijakan kredit dan penagihan sebagai berikut:

1. Standar kredit standar minimum untuk menentukan apakah permohonan kredit layak atau tidak oleh perusahaan.
2. Persyaratan kredit. Menspesifikan lamanya waktu kredit diperpanjang bagi konsumen.
3. Risiko gagal bayar. Bagian ini berkaitan dengan lambatnya penagihan dan jumlah piutang yang lalai diselesaikan.
4. Kebijakan dan prosedur penagihan. Perusahaan menentukan kebijakan penagihan keseluruhannya dengan

menggabungkan berbagai prosedur penagihan yang diterapkan. Prosedur- prosedur ini meliputi berbagai hal seperti surat, faks, panggilan telepon, kunjungan pribadi, dan tindakan hukum.

2.2.7 Pengendalian Intern Piutang

Menurut Warren (Rachimadita, 2013)

"Pengendalian internal untuk piutang dagang adalah pemisahan fungsi persetujuan kredit, fungsi penjualan, fungsi akuntansi, dan fungsi penagihan"

Sedangkan menurut Hery (Rachimadita, 2013) menjelaskan bahwa:

"Pengendalian Intern atas Piutang Usaha adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang usaha, baik dari segi pengamanan atas perolehan ilsik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit) sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat."

Dari definisi-definisi diatas dapat diumpulkan bahwa pengendalian atas piutang yang dilakukan untuk memperoleh pengamanan yang efektif dan efisien perlu adanya pemisahan fungsi, pemisahan tugas dan tersedia catatan yang yang akurat. Pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan, sampai setelah penyiapan dan pendebitan faktur, dan berakhir dengan penagihan hasil penjualan. Pengendalian intern terhadap piutang

yang dilakukan pihak manajemen adalah bertujuan untuk melihat seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aktiva operasi khususnya unsur-unsur modal yang sangat signifikan seperti piutang. Pengendalian internal piutang adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa piutang dikelola dengan baik, dilaporkan secara akurat, dan dikumpulkan tepat waktu. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih, memastikan integritas laporan keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

2.2.8 Unsur-Unsur Pengendalian Intern Piutang

Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan unsur-unsur pengendalian intern untuk mencapai tujuan dari pengendalian intern menurut COSO. Komponen pengendalian intern ini akan diaplikasikan dalam melaksanakan pengendalian intern piutang. Pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur penting yang bekerja secara terpadu untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian dalam suatu organisasi. Unsur pertama adalah lingkungan pengendalian, yang merupakan fondasi dari semua elemen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencakup budaya organisasi, nilai-nilai etika, integritas, dan kompetensi karyawan, serta filosofi dan gaya operasi manajemen. Elemen ini menciptakan suasana yang

mempengaruhi kesadaran pengendalian seluruh organisasi. Penilaian risiko adalah unsur kedua, di mana organisasi secara sistematis mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Ini melibatkan analisis risiko dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, dan menetapkan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Dengan mengidentifikasi risiko lebih awal, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak negatif. Aktivitas pengendalian adalah unsur ketiga yang mencakup kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan organisasi. Aktivitas ini meliputi otorisasi transaksi, verifikasi, rekonsiliasi, peninjauan atas kinerja operasi, dan pembatasan akses fisik terhadap aset. Aktivitas pengendalian memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diterapkan dengan konsisten dan tepat. Unsur keempat adalah informasi dan komunikasi, yang mencakup proses untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan efisien. Informasi yang akurat dan lengkap sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada pihak yang tepat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Unsur kelima adalah pemantauan, yang melibatkan penilaian terus-menerus atau berkala atas efektivitas

sistem pengendalian internal. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan monitoring rutin, audit internal, dan penilaian kinerja. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian sehingga organisasi dapat menyesuaikan dan meningkatkan proses pengendalian internalnya.

Dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur ini, organisasi dapat membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif, membantu memastikan pencapaian tujuan strategis, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku :

1. Aktivitas Pengendalian

Kategori dari aktivitas pengendalian, yaitu:

a. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas yang memadai akan mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan ataupun menyembunyikan kecurangan yang dilakukan atas piutang. Bila orang yang melakukan otorisasi piutang, serta yang mencatatnya adalah orang yang sama, maka akan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan kecurangan atas piutang tersebut.

b. Pengawasan Pengolahan Informasi

Pengawasan pengolahan Informasi piutang ada dua yaitu pengawasan umum dan pengawasan aplikasi. Pada

pengendalian umum, pemisahan fungsi-fungsi pokok seperti kegiatan operasi yang mendukung munculnya piutang, penyimpanan hasil tagihan piutang, dan catatan akuntansi piutang sangat diperlukan dalam pengendalian piutang. sistem dan program yang digunakan untuk mengolah piutang akan membantu dalam mengawasi data piutang, apalagi didukung oleh fasilitas pengolahan data seperti dengan menggunakan password yang hanya dapat digunakan data piutang yang tersimpan dalam komputer.

c. Pengawasan aplikasi piutang merupakan

Pengawasan terhadap pengolahan transaksi yang mencakup prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan, serta perancangan dokumen dan catatan.

d. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik termasuk penjagaan, seperti terhadap catatan dan dokumen, fasilitas yang diamankan, otorisasi untuk akses terhadap komputerisasi dan arsip data, serta perhitungan.

e. Review terhadap kinerja

Review terhadap kinerja atas penanganan piutang dapat dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa perincian laporan ringkas jumlah piutang yang tercantum dalam akun

buku besar piutang seperti daftar umur piutang, laporan penjualan. Dari akun daftar umur piutang akan dapat diketahui jumlah piutang yang macet pembayarannya. Apabila jumlah piutang yang macet terdapat dalam jumlah yang besar, itu berarti kinerja bagian penagihan tidak optimal.

f. Lingkungan Pengendalian

Esensi dari organisasi dikendalikan dengan efektif terletak pada sikap manajemen. Lingkungan pengendalian atas piutang sikap dan tindakan pada pemilik dan manajer perusahaan mengenai perhitungan pengendalian internal perusahaan, efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan untuk ruang lingkup yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian tersebut.

g. Penilaian Risiko

Penilaian resiko atas piutang usaha yang paling utama adalah penentuan piutang yang tidak tertagih. Perusahaan juga harus menilai resiko dari karyawan. Banyak cara yang dapat dilakukan karyawan untuk melakukan penyelewengan. Contohnya, karyawan yang bertugas menagih piutang ke konsumen tidak menyetorkan hasil tagihannya ke kasir dan melaporkan bahwa piutang belum tertagih dengan alasan konsumen tidak ada dirumah ataupun konsumen akan membayarkannya bulan depan. Penyelewengan lainnya yang

dapat dilakukan adalah dimana karyawan tetap mencatat penerimaan kas dari tagihan piutang namun karyawan tersebut tidak menyetorkannya ke bank. Untuk menutupinya karyawan tersebut memanipulasi terhadap laporan rekonsiliasi bank. Cara lainnya untuk melakukan penyelewengan yaitu dengan tidak mencatat penerimaan kas dari piutang dan menghalang-halangi untuk mengirimkan surat pemberitahuan laporan bulanan piutang yang tertunggak kepada konsumen untuk menghindari terjadinya keluhan konsumen tersebut. Dengan begitu perkiraan saldo piutang konsumen tidak berubah dan untuk mengurangi saldo piutang tersebut maka dibuat penghapusan piutang. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar membuat suatu kebijakan yang baik mengenai pembagian tugas yang memadai atas penagihan piutang, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan, pelatihan-pelatihan kepada karyawan, psikologis karyawan itu sendiri serta konsistensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Disisi lain perusahaan juga harus bisa menganalisa konsumen yang potensial dalam membayar hutangnya. Ini semua ditujukan untuk memperkecil penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi. Informasi dan Komunikasi Transaksi piutang dicatat

mulai dari jumlah umum kemudian diposting di buku besar pembantu dan selanjutnya dicatat dalam buku besar piutang. Setiap salinan buku besar piutang akan dihasilkan dan kemudian secara berkala tagihan piutang akan meringkas saldo setiap rekening piutang dan mengirimkannya ke buku besar umum. Selanjutnya bagi yang buku besar umum akan melakukan penutupan periode pemrosesan dengan menerima dokumen jumlah dari bagian penagihan dan ringkasan rekening dari bagian piutang yang akan memberikan informasi mengenai kebenaran dari seluruh proses. Dengan mencocokkan dokumen jumlah dan ringkasan rekening yang diterima dari bagian operasional, buku besar dapat mendeteksi banyak tipe kesalahan. Hasil pemrosesan dari bagian piutang dengan bagian buku besar umum adalah pernyataan piutang yang tepat jumlahnya. Agar informasi mengenai piutang dapat digunakan dengan sebaik mungkin, maka harus adanya sistem komunikasi yang baik. Komunikasi ini meliputi luasnya pemahaman karyawan tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan piutang yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Dalam akuntansi, secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur. Pernyataan piutang merupakan unsur pengendalian intern yang baik

dalam pencatatan piutang. Dengan mengirimkan secara periodik pernyataan piutang pada para debitur, catatan piutang perusahaan diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima debitur dari pengiriman pernyataan piutang tersebut. Disamping itu pengiriman pernyataan piutang secara periodik kepada debitur akan menimbulkan citra yang baik dimata debitur mengenai kehandalan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

h. Pemantauan

Pemantauan pengendalian piutang dilakukan untuk melihat apakah pengendalian intem terhadap piutang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan auditor internal atau personel. Pihak manajemen dapat melihat pengendalian intem terhadap piutang tidak berjalan dengan baik, dengan melihattetap tingginya jumlah piutang yang macet. Bila jumlah piutang macet tinggi, itu beraiti kineija bagian penagihan tidak optimal sehingga tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang yang macet.

2.2.9 Prosedur dan Kebijakan Penjualan Kredit

1. Prosedur Penjualan Kredit

Prosedur penjualan kredit menurut Mulyadi (2008,220) adalah dalam penjualan kredit terdapat beberapa

prosedur yang dilakukan antara lain prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang dan prosedur distribusi penjualan. Diantaranya seperti dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Order Penjualan

Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi melayani order dari pembeli.

b. Prosedur Persetujuan Kredit

Fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit.

c. Prosedur Pengiriman

Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman.

d. Prosedur Penagihan

Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu

faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman.

e. Prosedur Pencatatan Piutang

Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kedalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang.

f. Prosedur Distribusi Penjualan

Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen.

Prosedur penjualan kredit dimulai dengan menerima permintaan dari pelanggan untuk membeli barang atau jasa dengan pembayaran yang ditunda. Setelah menerima permintaan, perusahaan melakukan evaluasi kelayakan kredit pelanggan. Evaluasi ini melibatkan pengecekan riwayat kredit pelanggan, analisis laporan keuangan, dan referensi bisnis untuk menilai kemampuan dan kemauan pelanggan membayar. Setelah pelanggan disetujui untuk menerima kredit, perusahaan menetapkan batas kredit dan syarat pembayaran. Penjualan kemudian diproses, dan barang atau jasa dikirimkan kepada pelanggan. Faktur penjualan dibuat dan dikirimkan kepada

pelanggan, mencantumkan rincian transaksi seperti jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, dan syarat pembayaran. Perusahaan memantau piutang secara rutin, memeriksa apakah pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika pembayaran tidak diterima tepat waktu, perusahaan akan mengirimkan pengingat kepada pelanggan. Jika pembayaran tetap belum dilakukan, proses penagihan yang lebih intensif mungkin diperlukan, termasuk kontak langsung atau surat resmi.

Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal atau menerapkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo. Jika piutang tidak dapat ditagih setelah berbagai upaya, perusahaan akan mengevaluasi apakah piutang tersebut harus dihapuskan dan dicatat sebagai piutang tak tertagih. Selama seluruh proses, catatan akurat harus disimpan untuk semua transaksi, pembayaran, dan komunikasi dengan pelanggan. Catatan ini penting untuk audit dan evaluasi berkala terhadap kebijakan kredit dan efektivitas proses penagihan.

2.2.10 Piutang Tertunggak

Menurut Mulyadi (2018: 5) piutang tak tertagih atau tertunggak merupakan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat oleh menjamin penanganan secara seragam. Piutang tak tertagih merupakan permasalahan serius didalam bidang usaha. Dalam adanya piutang tak tertagih perusahaan akan mengalami transaksi penurunan omset atau pendapatan usaha. Menurut Kieso (2018: 350) Piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat pada akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba.

Berdasarkan teori diatas piutang tak tertagih merupakan permasalahan yang sangat serius di bidang usaha, dengan adanya piutang tak tertagih perusahaan akan mengalami penurunan omset atau pendapatan usaha. Menurut Warren (2014: 449) terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih atau tertunggak , diantaranya adalah:

- a) Saat piutang sudah jatuh tempo
- b) Pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih
- c) Pelanggan pailit
- d) Usaha pelanggan tutup
- e) Kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

2.2.11 Resiko Piutang Tertunggak

Berdasarkan jurnal analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan resiko piutang tak tertagih yang di tulis oleh Gitania Aimbu, Herman Karamoy, Steven J. Tangkuman (2021), mengatakan bahwa suatu resiko yang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit disebut sebagai resiko kerugian piutang. Resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a) Resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang)
- b) Resiko tidak dibayarnya sebagian piutang
- c) Resiko keterlambatan pelunasan piutang
- d) Resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang.

2.3 Kerangka Konsep

Penelitian ini dimulai dengan objek penelitian yaitu UD. Galaxy Motor yang berada di kota Jombang. setelah objek penelitian ini ditentukan, maka hal yang akan ditentukan dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesehatan pengendalian intern piutang tertunggak pada UD. Galaxy Motor.

